



Panduan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



1



5



2



6

Together Achieving
Millennium Development
Goals by 2015



3



7



4



8

Untuk
Pengawasan Program dan
Pencapaian Target MDGs
di Daerah

I. Pendahuluan

Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah sebuah paradigma pembangunan yang berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Paradigma pembangunan milenium ini merupakan kesepakatan 189 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2000 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Milenium.

Indonesia adalah negara yang ikut menyatakan komitmennya untuk memenuhi ke-8 Tujuan MDGs, yang terdiri dari:

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim;
- 2) Memberikan pendidikan dasar untuk semua;
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Menurunkan angka kematian anak;
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu;
- 6) Memerangi HIV/AIDS, TB, malaria, dan penyakit menular lainnya;
- 7) Memulihkan kelestarian lingkungan hidup; dan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Ke-8 Tujuan tersebut memiliki target dan indikator yang sederhana, terukur dan memiliki target waktu pencapaian yakni tahun 2015.

Saat ini, kita hanya punya waktu empat tahun bagi akselerasi pencapaian MDGs. Terobosan konkret perencanaan kebijakan dan program, penganggaran dan pengawasan diperlukan baik di tingkat nasional dan lokal. Dukungan DPR RI dan Anggotanya melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut yang mendorong akselerasi MDGs diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan meningkatkan akuntabilitas DPR RI dan Anggotanya kepada konstituen.

Manual ini disusun untuk memfasilitasi DPR RI menggunakan MDGs sebagai rujukan pelaksanaan fungsi-fungsi anggota DPR RI terutama dalam kegiatan Kunjungan Kerja atau *spot checking*. Lebih dari itu, Manual ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain dari Anggota DPR RI misalnya saat berinteraksi dengan konstituen, Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah, LSM, atau lainnya ataupun saat penyusunan anggaran.

II. Relevansi Kunjungan Kerja dan Pencapaian MDGs

Kunjungan Kerja merupakan kewajiban Anggota DPR RI yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD pada Pasal 79 tentang Kewajiban Anggota. Sebagai kewajiban Anggota DPR RI, maka Kunjungan Kerja perlu dilakukan sebaik-baiknya untuk menjalankan fungsi pengawasan yang melekat pada setiap Anggota DPR RI.

MDGs sebagai komitmen bersama dan acuan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, perlu menjadi acuan kerja Anggota DPR RI 2009-2014. MDGs dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah maupun DPRD, termasuk kinerja Pemerintah, pada upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan umum di daerah di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota.

Jajaran Pemerintahan Daerah yang kinerja pencapaian MDGs dibawah rata-rata nasional perlu dimotivasi, didorong, didesak dan difasilitasi agar dapat memperbaiki kinerja dan melakukan inovasi dan terobosan yang pada akhirnya dapat menghasilkan akselerasi pencapaian target-target MDGs.

Daerah yang sudah menunjukkan kinerja diatas rata-rata nasional juga dimotivasi, didorong, didesak dan difasilitasi untuk tidak berpuas diri, dan tetap melakukan inovasi dan terobosan untuk melampaui target-target MDGs.

III. *Stakeholder* (SKPD) terkait MDGs di Pemerintah Daerah

Kepala Daerah yakni Gubernur dan Bupati/ Walikota menjadi pemegang tanggung jawab utama pencapaian MDGs di daerah yang dipilih dan bertanggung jawab secara politik kepada rakyat setiap 5 tahun. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan di daerah terbagi ke dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD. Identifikasi SKPD berguna untuk mengetahui pembagian tanggung jawab kewenangan, pembuatan kebijakan dan implementasi program, serta pemantauan dan evaluasi.

Kompleksitas tantangan pencapaian MDGs membutuhkan sinergi lintas SKPD. Jumlah dan ruang lingkup SKPD tentu berbeda antardaerah. Namun tiap Tujuan MDGs memiliki SKPD tertentu sebagai penanggung jawab utama. Beberapa SKPD lain dalam porsinya masing-masing ikut bertanggung jawab untuk mendukung keberhasilan pencapaian MDGs. Meski Dinas Kesehatan menjadi penanggung jawab utama MDG 5 yakni Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu misalnya, namun Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan juga memiliki tanggung jawab dan kewenangan mendukung pencapaian

MDG5 seperti misalnya lewat program peningkatan kesadaran ibu atas kualitas kesehatan si ibu dan kandungan.

Dengan kata lain, pencapaian MDGs tidak menjadi tanggung jawab satu SKPD saja. Tetapi tanggung jawab bersama dengan satu SKPD sebagai penanggung jawab utama dan lainnya mendukung secara sinergis. Pencapaian MDGs membutuhkan sinergi intensif dan erat lintas SKPD pada tingkatan kebijakan, implementasi program, serta pengawasan dan evaluasi.

Identifikasi *stakeholder* penanggung jawab utama dan pendukung pencapaian MDGs diperlukan agar diperoleh kejelasan tanggung jawab, kewenangan, sinergi dan relasi kerja antar*stakeholder* dan pengukuran kinerja yang proporsional.

Kunjungan Kerja Anggota DPR ke daerah diharapkan dapat melibatkan SKPD penanggung jawab tiap Tujuan MDGs. Identifikasi institusi SKPD dibawah ini tidak inklusif tetapi dapat ditambahkan atau disesuaikan menurut konteks daerah.

Tabel I.
Tujuan Pembangunan Milenium dan
SKPD Penanggung Jawab Utama

No	Tujuan	Stakeholder (SKPD) yang terlibat
1.	Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.	Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua	Dinas Pendidikan
3.	Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Badan / Dinas Pemberdayaan Perempuan
4.	Menurunkan angka kematian anak	Dinas Kesehatan
5.	Meningkatkan kualitas kesehatan ibu	Dinas Kesehatan
6.	Memerangi HIV/ AIDS, TB, Malaria, dan Penyakit Menular Lainnya	Dinas Kesehatan
7.	Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kehutanan
8.	Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

*) Selain *stakeholder* di atas, Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, BAPPEDA dan BPS adalah *stakeholder* yang juga sangat penting dilibatkan dalam diskusi/koordinasi.

IV. Uji Cepat/ *Checklist* untuk Program dan Anggaran MDGs di Daerah

No.	Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
Kriteria Pertama Memprioritaskan Pembangunan Manusia			
1	Apakah alokasi APBD untuk pendidikan sudah mencapai setidaknya 20%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Apakah alokasi APBD untuk kesehatan sudah mencapai setidaknya 15%?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Apa terobosan daerah untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)? Apakah anggarannya memadai? Bagaimana kemajuannya 5 tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Apa terobosan daerah untuk mengatasi tingginya Angka Kematian Bayi (AKB)? Apakah anggarannya memadai? Bagaimana kemajuannya 5 tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Apa terobosan daerah untuk mengatasi kasus gizi buruk? Apakah anggarannya memadai? Bagaimana kemajuannya 5 tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
6 Apa terobosan daerah untuk mengatasi penyakit menular (malaria, HIV/AIDS, TBC, dst)? Apakah anggarannya memadai? Bagaimana kemajuannya dalam 5 tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Apa terobosan daerah untuk meningkatkan Angka Partisipasi sekolah, baik laki-laki maupun perempuan, terutama untuk jenjang pendidikan SMP keatas? Apakah anggarannya memadai? Bagaimana kemajuannya dalam 5 tahun terakhir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kriteria Kedua: Memprioritaskan upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan		
8 Apa terobosan daerah untuk meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di setiap jenjang pendidikan? Apakah anggarannya memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Apa terobosan daerah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan? Apakah anggarannya memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Apa terobosan daerah untuk peningkatan kapasitas pegawai perempuan di pemerintahan? Apakah anggarannya memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Apa terobosan daerah khusus untuk meningkatkan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Perempuan? Apakah anggarannya memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kriteria Ketiga:**Memprioritaskan upaya-upaya penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat miskin**

12 Apa terobosan daerah untuk memberi akses layanan kesehatan berkualitas dan dan murah (atau gratis) untuk kelompok miskin? Bagaimana hasilnya pada pencapaian MDGs?

13 Sudah idealkah rasio jumlah tenaga dokter umum, dokter spesialis, dan bidan desa terhadap jumlah penduduk tiap desa? Bagaimana distribusinya? Apa terobosan daerah untuk penyediaan tenaga terlatih? Dukungan apa yang dibutuhkan dari IDI, IDAI, IBI dan organisasi profesi kesehatan lainnya?

14 Berapa besar anggaran untuk layanan Puskesmas, Posyandu, dan Rumah Sakit, serta sistem rujukan? Berapa proporsi yang bersumber dari pusat dan dari daerah?

15 Apa terobosan daerah untuk memperbaiki penyediaan dan akses air bersih yang layak dan aman untuk kelompok miskin? Apakah anggarannya memadai?

16 Apa terobosan daerah untuk mengurangi tingkat putus sekolah SD, SLTP, SMU/ sederajat? Apa saja faktor utama penyebab putus sekolah? Apakah terobosan itu efektif?

No. Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
17 Berapa jumlah tenaga pendidikan di tiap jenjang SD, SLTP, SMU/ sederajat? Berapa persentase tenaga pendidikan yang telah bersertifikat dan lulusan D3 atau SI?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18 Berapa jumlah tambahan anggaran APBD untuk pemeliharaan dan perbaikan fisik sekolah tahun ini (diluar anggaran pusat)? Berapa persen dari total seluruh anggaran pendidikan daerah?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Pada tiap jenjang pendidikan SD, SLTP, SMU/ sederajatnya, berapa persentase sekolah yang telah beratap genteng dan berdinding tembok/kayu, punya akses listrik, memiliki lab komputer dan akses internet? Apa terobosan daerah untuk itu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Berapa jumlah area dikategorikan tertinggal, apa saja faktor penyebabnya? Apa saja upaya terobosan yang dilakukan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di area tertinggal tersebut? (Infrastruktur, Pembiayaan, dll.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Kriteria Keempat: Memprioritaskan upaya-upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat</p>		
21 Apa terobosan daerah bagi bantuan modal usaha untuk keluarga miskin, dengan memperhatikan secara khusus perempuan kepala keluarga? Apakah anggarannya memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No. Daftar Pertanyaan	Ya	Tidak
<p>22 Apa terobosan daerah untuk menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil milik kelompok miskin? Apa saja bidang usaha potensial sektor mikro dan kecil di daerah yang bisa menjadi prioritas sektor pembangunan? Berapa jumlah usaha mikro dan kecil?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>23 Apa saja Perda yang sudah pro-usaha mikro atau kecil? Apa kendala utama pengembangan usaha rakyat yang bisa ditangani segera oleh Pemda?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>24 Berapa nilai tukar petani (<i>terms of trade</i>) dan nelayan di daerah tersebut? Bagaimana potret kemajuan nilai tukar tersebut dalam 5 tahun terakhir?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>25 Berapa persen laju pertumbuhan jumlah penduduk daerah tersebut? Berapa persen tingkat migrasi netto, kelahiran, dan kematian? Apa saja terobosan daerah untuk meningkatkan kualitas demografi masyarakat?</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V. Checklist untuk Ketersediaan Data MDGs di Daerah

* berikan tanda v (data tersedia) atau x (data tidak tersedia) untuk setiap data MDGs dibawah ini

TUJUAN 1: MENANGGULANG KEMISKINAN DAN KELAPARAN EKSTREM

Target 1: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari

1 Kemiskinan (1\$ per-hari)

1a Kemiskinan (Nasional)

1b Kemiskinan (2\$ per-hari)

2 Indeks kedalaman kemiskinan

2a Indeks keparahan kemiskinan

3 Proporsi konsumsi penduduk termiskin

Target 2: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan

4 Malnutrisi anak

5 Kecukupan konsumsi kalori

TUJUAN 2: MENCAPAI PENDIDIKAN UNTUK SEMUA

target 3: Menjamin pada 2015 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

6 Partisipasi ditingkat SD (APM)

6a Partisipasi ditingkat SMP (APM)

7a Proporsi murid yang bersekolah hingga kelas 5

7b Proporsi murid yang tamat SD

8 Melek Huruf Usia 15-24

TUJUAN 3: MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Target 4: Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan tahun 2005, dan di semua jenjang sebelum 2015

9a	Rasio Anak perempuan di SD
9b	Rasio Anak perempuan di SMP
9c	Rasio Anak perempuan di SMA
9d	Rasio Anak perempuan di Perguruan Tinggi
10	Rasio melek huruf perempuan usia 15-24 Thn
10a	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
10b	Tingkat pengangguran terbuka perempuan
11	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan
11a	Tingkat daya beli perempuan
11b	Kesenjangan upah
12	Perempuan di DPR

TUJUAN 4: MENGURANGI KEMATIAN ANAK

Target 5: Menurunkan angka kematian balita sebesar dua-per-tiganya antara 1990 dan 2015

13	Tingkat kematian anak (1-5 tahun)/per 1.000
14	Tingkat kematian bayi (per 1.000)
15	Tingkat imunisasi campak - usia 12 Bulan
15a	Tingkat imunisasi campak - usia 12 - 23 Bulan

TUJUAN 5: MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

Target 6: Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-per-empatnya antara 1990 dan 2015

16	Tingkat kematian ibu (Per 100.000)
17	Kelahiran yang dibantu tenaga terlatih
17a	Wanita menikah usia 15-49 yang menggunakan Alat KB

TUJUAN 6: MEMERANG HIV/AIDS DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Target 7: Mengendalikan Penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan kasus baru pada 2015

18	Prevalensi HIV dan AIDS
19	Penggunaan kondom sebagai alat kontrasepsi
19a	Penggunaan kondom pada hubungan seks resiko tinggi
19b	Persentase populasi usia 12-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
	Laki-laki
	Perempuan

Target 8: Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya kasus malaria dan penyakit lainnya tahun 2015

21	Kasus Malaria (Per 1.000)
21a	Jawa dan Bali (Per 1.000)
21b	Luar Jawa dan Bali (Per 1.000)
23	Prevalensi TBC (Per 100.000)
23a	Angka penemuan kasus
24	Kesembuhan dengan DOTS

TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Target 9: Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan program nasional serta mengembalikan sumber daya yang hilang

25	Kawasan tertutup hutan
26	Kawasan perlindungan daratan
26a	Kawasan lindung laut
27	Rasio penggunaan energi terhadap PDB
28a	Emisi CO ₂
28b	Konsumsi CFC - pengurangan ozon
29	Penggunaan biomassa

Target 10: Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015

30 Proporsi penduduk terhadap air bersih

30a Air minum perpipaan kota

30b Air minum perpipaan desa

30c Sumber air terlindungi - perkotaan

30d Sumber air terlindungi - perdesaan

31 Sanitasi yang baik

31a Rumah tangga di perkotaan

31b Rumah tangga di perdesaan

Target 11: Memperbaiki kehidupan penduduk miskin yang hidup di pemukiman kumuh pada 2020

32 Proporsi kepastian kepemilikan lahan

TUJUAN 8 – MENGEKSPANSIKAN KEMERDEKAAN GLOBAL

Target 12. Melakukan pembangunan lebih lanjut sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan dan diprediksi dan non-diskriminatif

33 Rasio ekspor-impor dengan PDB

34a Rasio kredit dan tabungan bank umum

34b Rasio kredit dan tabungan bank perkreditan rakyat

Target 13. Penanggulangan Masalah pinjaman luar negeri melalui upaya nasional maupun internasional dalam rangka pengelolaan utang luar negeri yang berkelanjutan dan berjangka panjang

35 Rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB

35b Rasio utang terhadap anggaran belanja

Target 14. Bekerjasama dengan negara-negara berkembang, mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan produktif untuk penduduk usia muda

36 Pengangguran 15-24 tahun

Target 15. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

37a Rumah tangga yang memiliki telepon

37b Rumah tangga yang memiliki telepon seluler

38a Rumah tangga yang memiliki komputer 4.40% (indikator) naik perlahan

38b Rumah tangga yang memiliki akses internet 4.20% (indikator) naik perlahan

VI. Checklist Pemantauan MDGs untuk Anggota DPR RI dan DPRD

Berikut ini adalah checklist yang dapat dipakai oleh Anggota DPR RI untuk mengecek sejauh mana komitmen parlemen terhadap pencapaian MDGs. Checklist ini dapat dipakai oleh Anggota DPR RI maupun DPRD sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengecek komitmen parlemen dan pemerintah dalam pencapaian MDGs.

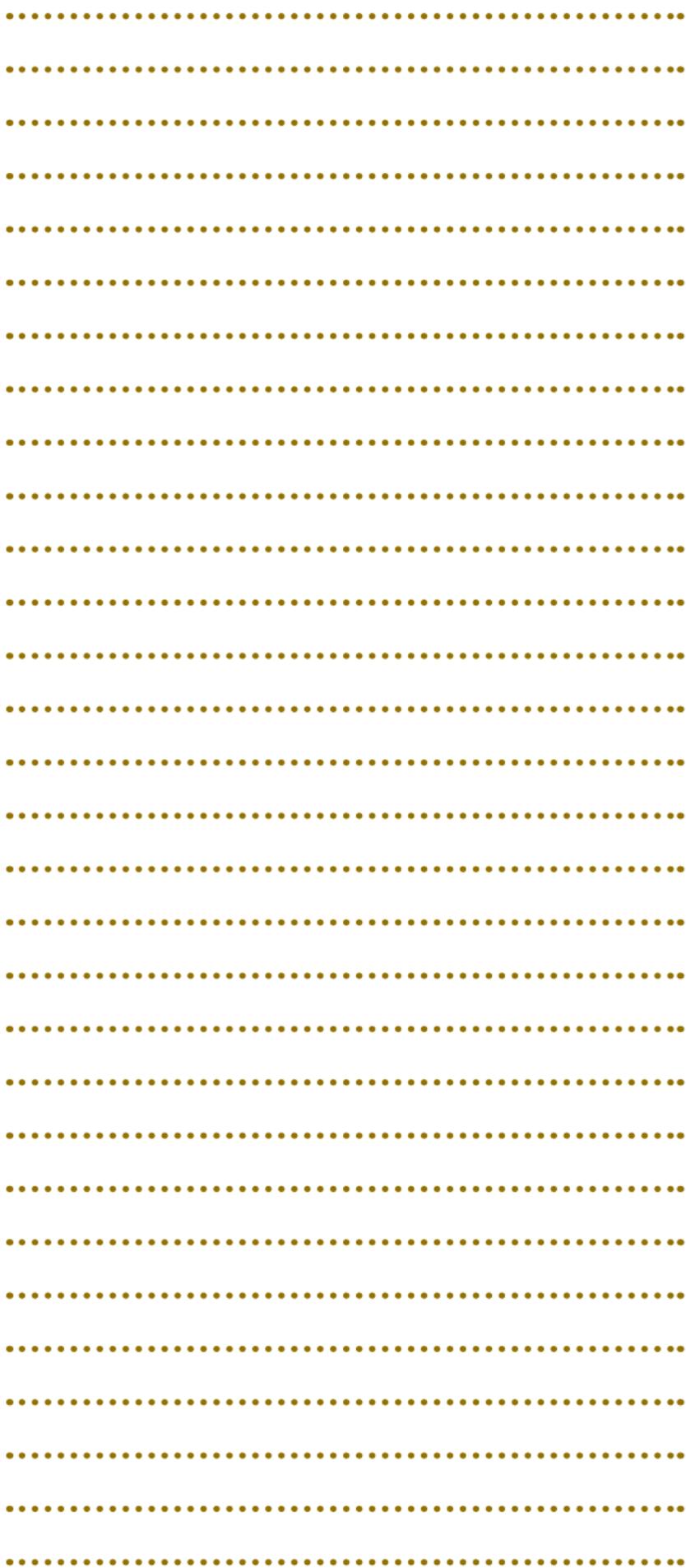
KETERLIBATAN DAN INFORMASI UMUM	✓	✗
Apakah setiap Anggota Parlemen sudah menerima salinan/kopi dari MDGs yang disertai target dan indikatornya?		
Apabila MDGs telah eksplisit diurusutamakan dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan? Apakah setiap Anggota Parlemen sudah menerima salinan/kopi dari MDGs yang diadaptasi secara lokal?		
Apakah Anggota Parlemen mengetahui Kementerian/SKPD yang menjadi penanggung jawab utama MDGs, dan apakah ada satuan kerja khusus pemantauan kemajuan MDGs di daerah anda?		
Apakah Parlemen secara rutin menerima dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MDGs dari Pemerintah/Pemda dan mitra pembangunan dari dunia internasional?		

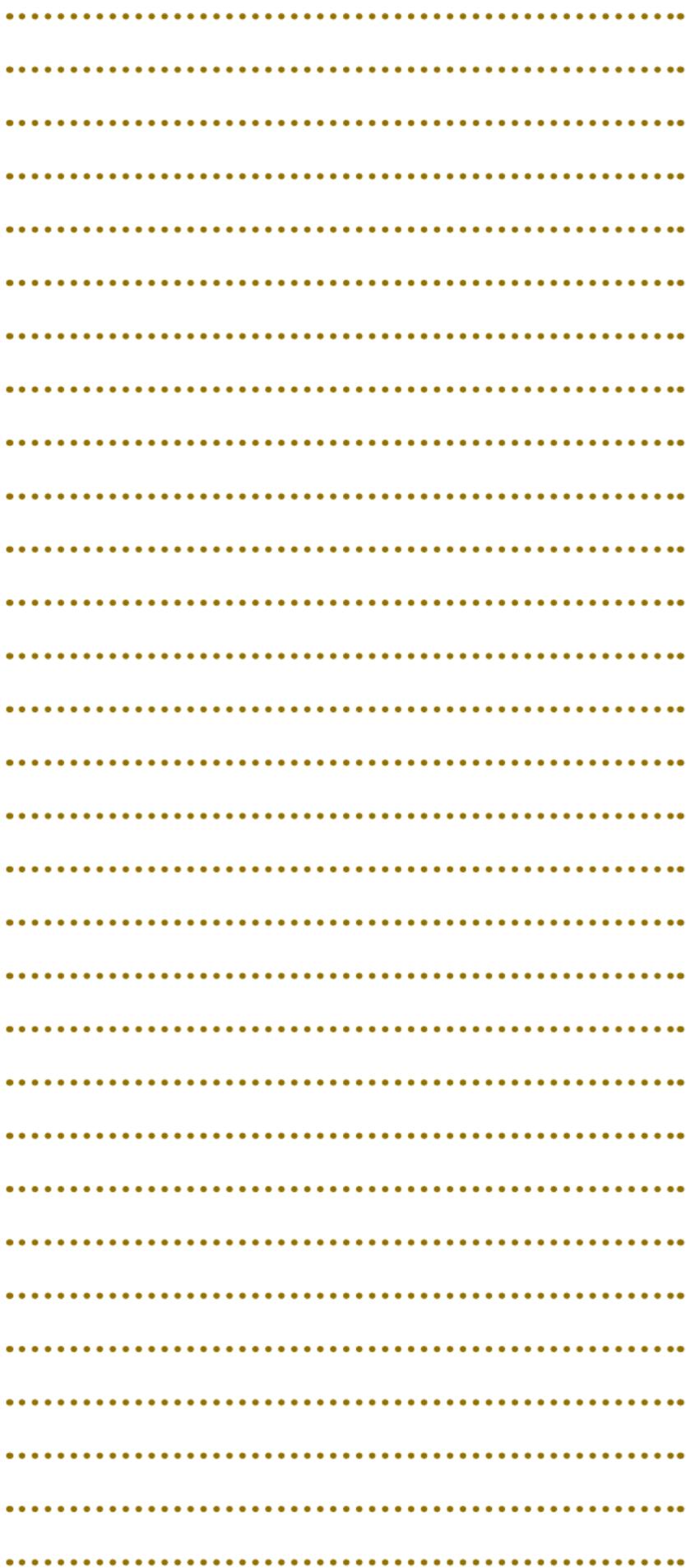
KETERLIBATAN DAN INFORMASI UMUM	✓	✗
Apakah briefing dan seminar-seminar tentang MDGs pernah dilaksanakan di dalam Parlemen anda?		
Apakah ada program tersendiri untuk sidang rutin Anggota Parlemen yang membahas isu-isu MDGs sepanjang masa jabatan Parlemen?		
Apakah kebijakan-kebijakan MDGs termasuk di dalam program-program yang diperkenalkan oleh Anggota Parlemen yang mengikuti Pemilu?		
Apakah Parlemen pernah mengadakan suatu event semisal meeting singkat atau “Hari Khusus MDGs” untuk menekankan komitmen Parlemen terhadap pencapaian MDGs?		

STRUKTUR PARLEMEN	✓	✗
Apakah Parlemen anda memiliki anggota parlemen yang dinominasikan sebagai <i>focal point</i> /juru bicara untuk isu MDGs?		
Apakah ada koalisi MDGs lintas partai atau Kaukus untuk Pengurangan Kemiskinan di dalam Parlemen Anda?		
Apakah Parlemen Anda hadir pada forum atau jaringan MDGs Parlemen di tingkat regional/nasional?		
Apakah Parlemen Anda sudah membentuk komite khusus untuk MDGs di dalam struktur keparlemenan?		
Apabila memang tidak ada komite khusus untuk MDGs di dalam struktur keparlemenan, apakah komite-komite lain yang duduk di parlemen mengetahui poin MDGs mana yang berada di dalam usaha pencapaian mereka? dan apakah hal ini dijelaskan/digambarkan dalam mandat mereka?		

MEKANISME KETERLIBATAN	✓	✗
Apakah laporan perkembangan MDGs yang dibuat oleh pemerintah dan mitra pembangunan internasional diperdebatkan di Parlemen?		
Apakah pemerintah secara formal dan rutin memberikan <i>update</i> tentang perkembangan yang berkenaan dengan MDGs kepada Parlemen?		
Apakah Anggota Parlemen pernah menanyakan baik secara tertulis ataupun secara lisan kepada pemerintah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan dalam pencapaian MDGs?		
Apakah Kementrian Negara / SKPD atau anggota satuan kerja MDGs mendatangi komisi-komisi di Parlemen untuk memberikan update atas perkembangan yang berkenaan dengan MDGs?		
Apakah komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen sudah menginisiasi investigasi terhadap perkembangan yang dihasilkan dalam mencapai satu atau lebih dari poin MDGs?		
Apakah komite-komite di Parlemen pernah mengundang mitra pembangunan internasional dan <i>stakeholders</i> kunci lainnya ke dalam sebuah <i>meeting</i> untuk meminta mereka memberikan bukti-bukti atas input mereka dalam proyek-proyek pencapaian MDGs?		
Apakah komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen pernah meminta CSOs hadir dalam sebuah <i>meeting</i> untuk memberikan masukan-masukan mereka atas isu-isu yang berkaitan dengan MDGs?		

MEKANISME KETERLIBATAN	✓	✗
Apakah Parlemen Anda baik secara institusi maupun secara individu Anggota Parlemen pernah mengadakan rapat umum untuk mendiskusikan MDGs bersama masyarakat?		
Apakah komite MDGs atau komite lainnya di Parlemen pernah mengadakan kunjungan ke lapangan untuk melihat secara langsung impact dari kebijakan-kebijakan terkait MDGs terhadap masyarakat?		
Apakah ada justifikasi tentang MDGs terhadap perundang-undangan/Peraturan Daerah yang dimasukkan pada catatan penjelasan untuk dilampirkan pada Rancangan Undang-undang / Raperda selama masa proses penyusunannya?		
Apakah Parlemen melakukan tracking dan memonitor perundang-undangan/Perda yang berkaitan dengan MDGs dan apakah ada pengawasan terhadap efektifitas suatu perundang-undangan/Perda?		





Panduan Kunjungan Kerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Together Achieving
Millennium Development
Goals by 2015